

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM MENGENDALIKAN
PERTUMBUHAN PENDUDUK DI KABUPATEN DEMAK**

Zakka Firmanda Syarif
NPP. 29.0864

*Asdaf Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah
Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil*

Email: zakkafs@gmail.com

ABSTRACT

*Population growth is the result of the significant development. The form of welfare can be conducted when there is a balance between population growth and food production. The high rate of population growth can cause social problems such as poverty, crime rates, and densely populated settlements. Demak's population growth in 2010-2020 period is higher than the Central and National Java Provinces. **Purpose:** the purpose of this study was to find out how the role of the Dinpermades P2KB in controlling population growth in the district of Demak **Methods:** used in writing is descriptive qualitative with data collection techniques used through interviews, observation and documentation. **Results/Findings:** study indicate that the Department of Community and Village Empowerment, Population Control and Family Planning has played an optimal role. There are several problems that must be faced, such as limited PLKB field staff, limited funds in socialization and participation in the Family Planning program for women's surgery methods, male surgery methods and implants. Furthermore, to fix the obstacles, the efforts that should be done are optimizing PPKBD and Sub PPKBD, participating in community activities by providing counseling, communication, information and education, providing basic needs for new family planning acceptors. The author provides suggestions for communicating, informing and educating teenagers using information media that are often used by the community. **Conclusion:** Dinpermades P2KB has played an optimal role in controlling population growth through several roles that are used as analysis in research. Although there are several obstacles, the efforts made by the P2KB Dinpermades are also considered to be able to offset the existing obstacles.*

Keywords: *Role, Population Growth, Family Planning, Advocacy, Communication, Information, Education*

ABSTRAK

Pertumbuhan penduduk merupakan fenomena akibat dari majunya pembangunan. Tingginya angka pertumbuhan penduduk dapat menyebabkan masalah sosial seperti kemiskinan, angka kriminalitas, dan pemukiman padat penduduk. pertumbuhan penduduk Kabupaten Demak sensus penduduk periode tahun 2010-2020 lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran dari Dinpermades P2KB dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di kabupaten demak. **Metode:** yang digunakan dalam

penulisan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** dari penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sudah berperan secara optimal. Terdapat beberapa hambatan yang harus dihadapi seperti keterbatasan tenaga lapangan PLKB, keterbatasan dana dalam sosialisasi dan kesertaan program Keluarga Berencana metode operasi wanita, metode operasi pria dan implan. Berkaitan dengan hambatan yang ada, upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan meliputi mengoptimalkan PPKBD dan Sub PPKBD, ikut serta pada kegiatan masyarakat dengan melaksanakan penyuluhan, komunikasi, informasi dan edukasi, pemberian keperluan pokok pada akseptor KB baru. **Kesimpulan:** Dinpermades P2KB sudah berperan secara optimal dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui beberapa peran yang dijadikan analisis dalam penelitian. Meskipun terdapat beberapa hambatan namun upaya yang dilakukan oleh Dinpermades P2KB juga dinilai dapat mengimbangi hambatan yang ada.

Kata kunci: Peran, Pertumbuhan Penduduk, Keluarga Berencana, Advokasi, Komunikasi, Informasi, Edukasi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penduduk merupakan unsur yang sangat penting dalam berdirinya sebuah negara selain adanya wilayah, pemerintah yang berdaulat dan pengakuan negara lain. Badan Pusat Statistik menyebutkan melalui hasil sensus penduduk pada tahun 2020 jumlah penduduk di Indonesia mencapai 271 juta jiwa. Banyaknya jumlah penduduk setara dengan 3.51% dari keseluruhan penduduk dunia yang menjadikan Indonesia menduduki peringkat ke empat di dunia setelah Amerika Serikat, India dan Tiongkok pada urutan pertama dengan jumlah penduduk paling banyak di dunia. Perkembangan zaman membuat penduduk dari desa banyak melakukan urbanisasi dengan harapan akan menemukan kehidupan yang lebih baik. Perpindahan penduduk mobilitas penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain salah satunya yaitu urbanisasi merupakan salah satu unsur dari pertumbuhan penduduk yaitu migrasi. Menurut Thomas Robert Maltus seorang pakar demografi dan ekonomi politik Inggris mengungkapkan pertumbuhan penduduk merupakan akibat dari majunya pembangunan, namun pertumbuhan penduduk ini harus diseimbangkan dengan produksi pangan yang memenuhi kebutuhan agar tercapainya kesejahteraan.

pertumbuhan penduduk yang dilihat dari penambahan jumlah penduduk Kabupaten Demak pada tahun 2014-2019 tergolong signifikan, tetapi pada tahun 2020 terjadi lonjakan jumlah penduduk yang begitu tinggi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan jumlah penduduk pada tahun 2020 meningkat sebesar 3,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mengalami peningkatan 0.95%. Dengan jumlah penduduk 1.203.956 jiwa pada Tahun 2020, Kabupaten Demak merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki jumlah penduduk cukup banyak. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Demak tergolong tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan penduduk Nasional dan pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah. Berikut merupakan perbandingan laju pertumbuhan penduduk Nasional, Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Demak pada tabel 1.1 periode sensus penduduk tahun 2000 sampai 2020.

Beberapa indikator untuk mencapai kesejahteraan penduduk selain produksi pangan yang memenuhi juga terdapat lapangan pekerjaan yang cukup, fasilitas kesehatan, pendidikan dan lingkungan penduduk yang sehat. Dikutip dari berita resmi statistik No. 7/01/Th. XXIV, 21 Januari 2021 hasil sensus penduduk tahun 2020 dan Kabupaten Demak Dalam Angka, presentase

pertumbuhan penduduk per tahun 2010-2020 di Kabupaten Demak mencapai 1,28% lebih tinggi dari Nasional dan Provinsi Jawa Tengah. Pertumbuhan penduduk dengan peningkatan yang cukup tinggi juga terjadi pada Provinsi Jawa Tengah pada periode 2010-2020, sedangkan pertumbuhan penduduk Nasional berhasil mengalami penurunan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil

Pengendalian pertumbuhan penduduk pada umumnya dilakukan Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai ruang lingkup pada bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kabupaten Demak mempunyai Organisasi Perangkat Daerah yang menjalankan pengendalian pertumbuhan penduduk melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Dinas ini mempunyai beban kerja yang besar yaitu mengurus pemberdayaan masyarakat dan desa, juga mengurus pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang di khawatirkan terjadi ketidakseimbangan antara dua beban kerja yang ada pada satu Organisasi Perangkat Daerah. Menurut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak merupakan Organisasi Perangkat Daerah dengan tipe A dimana mempunyai beban kerja besar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidangnya. Beban kerja besar yang ada harus di imbangi dengan Sumberdaya Manusia yang ahli pada bidangnya dan Infrastruktur untuk menunjang kegiatan yang ada baik diruangan dan dilapangan.

Upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk masih menjadi aspek strategis yang masih dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pertumbuhan Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak. Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 Kabupaten Demak menyatakan sembilan permasalahan yang masih di alami. Dari keseluruhan masalah yang ada lima diantaranya adalah permasalahan mengenai kependudukan yaitu belum optimalnya cakupan masyarakat Pasangan Usia Subur dalam partisipasi program Keluarga Berencana, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam program keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat, masih tingginya angka pertumbuhan penduduk, terbatasnya alat kontrasepsi untuk pria dan rendahnya kuantitas tenaga lapangan keluarga berencana.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks mengedalikan pertumbuhan penduduk. Penelitian berjudul Peranan Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencanan Dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Larasati et.al (2019), menemukan bahwa peranan dalam menekan pertumbuhan penduduk yang meliputi koordinasi dengan lembaga pemerintah, masyarakat dan swasta dalam kegiatan KB, melakukan konseling KB, pemasangan alat kontrasepsi serta penanggulangan paska pemasangan alat kontrasepsi. Hambatan dalam pengendalian pertumbuhan penduduk yaitu kurangnya tenaga teknis yang ahli, infrastruktur yang belum memadai, pengaruh kultur dan tingkat pendidikan masyarakat juga menjadi hambatan DP2KB dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penelitian selanjutnya menemukan bahwa Analisis The Growth Strategy, Program yang dilakukan yaitu kegiatan Pembentukan dan Peresmian Kampung Keluarga Berencana, Analisis The Welfare Strategy, Program yang dilakukan yaitu menumbuhkan serta meningkatkan kepedulian masyarakat dalam rangka penyuluhan dan pergerakan keluarga Berencana dan melakukan pelayanan menggunakan mobil pelayanan KB, Analisis The Responsitive Strategy,

Program yang dilakukanyaitu sosialisasi pergerakan masyarakat peduli KB berkualitas, Analisis The Integrated and Holistic Strategy, Program yang dilakukan yaitu kegiatan Pembinaan Kader KB se Kota Mataram, Faktor pendorong Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pelaksanaan Pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Kota Mataram yaitu dengan adanya undangundang dan peraturan walikota Mataram yang bisa menjadi pendorong dalam berjalannya setiap program yang telah dibuat oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Abdurrahman et.al (2019). Penelitian Syarifudin & Mulda, Rahmayandi (2020) menemukan bahwa Komunikasi Informasi dalam hal Edukasi masih kurang dalam penyampaian informasi serta pelayanan kepada publik. Sumber Daya Manusia cukup baik mengenai kerjasama dengan mitra kerja akan tetapi kurang baik mengenai pekerja lapangan keluarga berencana karena jumlahnya yang sedikit. Disposisi terealisasi jika dilihat dari Peserta aktif Semua Metode , namun jika dilihat dari tiap metode kontrasepsi ada 2 (dua) yang tidak terealisasi yaitu MOP dan kondom, dan angka prevalensinya juga menurun. Struktur birokrasi sudah baik karena sudah dijalankan sesuai Peraturan pemerintah daerah.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penelitian yang dilakukan mempunyai hasil pada peran dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Demak menggunakan kebijakan dari pemerintah pusat dengan nama baru yaitu program bangga kencana atau pembanggunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana. Selain program yang dengan nama baru, metode sosialisasi juga mengikuti perkembangan zaman yaitu dengan metode whatsapp dan podcast yang dilakukan di radio.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran, hambatan dan upaya apa yang dilakukan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di kabupaten demak.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif, menurut Crosswell (2015 : 4) penelitian kualitatif adalah “metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan” kemudian dapat disimpulkan bahwa metode kualitatif berusaha untuk memahami dan menafsirkan makna dari peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam keadaan tertentu menurut cara pandang penulis. Kemudian penulis menjadi instrumen kunci dalam penelitian artinya menjadi pengumpul data penelitian.

Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 12 orang informan yang terdiri dari kepala dinas, sekretaris dinas, kabid keluarga berencana, kabid pengendalian penduduk dan pergerakan, kasi pengendalian penduduk dan informasi keluarga, PLKB kecamatan 3 orang, dan masyarakat (dalam hal ini wanita pasangan usia subur sebagai objek penelitian sebanyak 4 orang).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis peran dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di kabupaten demak menggunakan pendapat Heroeputri & Santoso (2003) mengemukakan beberapa dimensi peran dalam 5 (lima) aspek yaitu peran sebagai suatu kebijakan, suatu strategi, suatu alat komunikasi, penyelesaian sengketa, alat terapi.

3.1. Peran dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di kabupaten demak

Penulis melakukan analisis terhadap peran sebagai suatu kebijakan bahwa setiap perumusan suatu kebijakan. Konsep musyawarah dengan pendekatan partisipasi aktif dari pemerintah dan perwakilan masyarakat adalah hal yang dilakukan untuk transparansi dalam perumusan kebijakan, kepercayaan masyarakat dalam kebijakan yang dilaksanakan berdampak langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat. Rapat koordinasi ini dimaksud untuk menyampaikan target-target dari pemerintah provinsi dan daerah. Selain itu rapat koordinasi ini juga bertujuan menerima penyampaian pendapat dari Sub PPKBD yang tugasnya langsung bersinggungan dengan masyarakat untuk menyampaikan hal yang diperlukan untuk ditambahkan dalam menjalankan pelayanan untuk dapat dijadikan sebuah kebijakan kedepannya dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk.

analisis terhadap peran sebagai strategi yang dibentuk oleh organisasi terlaksananya visi melalui misi, tujuan dan strategi, dan fasilitas berupa sarana dan prasarana penunjang pelayanan. Penunjang aktivitas seperti sarana dan prasarana yang ada pada suatu instansi menjadi suatu perihalan yang dipertimbangkan, dimana hal ini mempunyai kualitas dan kuantitas yang berbeda. Perhatian lembaga terhadap kebutuhan fasilitas pendukung perlu mengutamakan standar barang dan jumlah barang yang dibutuhkan kemudian disesuaikan dengan anggaran. Sarana dan prasarana yang telah memenuhi persyaratan dan jumlah yang cukup untuk menopang kegiatan keseharian, baik untuk kegiatan administrasi maupun aktivitas di lapangan. Berdasarkan sarana dan prasarana, dalam rangka mengendalikan pertumbuhan penduduk di Kabupaten Demak cukup baik diselenggarakan mengingat sarana yang ada dapat menunjang pegawai yang ada di kantor dan dilapangan melaksanakan tugas dengan lancar dari sarana yang tersedia tanpa hambatan, termasuk dengan tersedianya berbagai jenis mobil, perangkat kantor, gedung yang memadai, dan sarana Komunikasi, Edukasi dan Informasi (KIE) bisa diselenggarakan secara optimal melalui Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPBKD). Dengan demikian masyarakat dapat mendapatkan pelayanan mulai dari Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), dan Bina Keluarga Berencana (BKB) yang diselenggarakan untuk mengedukasi masyarakat untuk menjadikan keluarga yang sejahtera. Fasilitas kesehatan yang dimiliki sangat baik dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan di masa pandemi, secara keseluruhan dapat digunakan secara maksimal kecuali mobil pelayanan KB yang selama berlangsungnya pandemi tidak melakukan operasional karena masyarakat meragukan tingkat kesterilan yang ada untuk mencegah penularan virus Covid-19.

Komunikasi berperan sebagai upaya untuk membangun persetujuan masyarakat terhadap pemberlakuan layanan, khususnya pelayanan KB dimana menjadi salah satu indikator penting dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui kehamilan yang direncanakan. Kerjasama dengan sekolah yang dinamakan sekolah siaga kependudukan dengan jumlah 14 sekolah menengah atas yang ada di Kabupaten Demak. Informasi lain yang digunakan dalam menyampaikan pengendalian penduduk juga melalui generasi berencana yang ada pada masing-masing kecamatan melalui Pusat

Informasi dan Konseling Remaja atau PIK-R yang berada pada sekolah dan karang taruna. Dinas juga melibatkan fasilitas kesehatan baik itu dari pemerintah maupun swasta yang pada tahun 2021 berjumlah 73 fasilitas kesehatan yang tersedia untuk memberikan informasi dan edukasi. Cara lain yang digunakan dalam penyampaian pesan juga dilakukan melalui podcast yang dilakukan pada radio suara kota wali dan juga melalui langkah praktis untuk tetap menjaga interaksi dengan Pasangan Usia Subur dan Wanita Usia Subur, yakni dengan melalui media informasi Whatsapp. Selain dari unsur pegawai Dinas, adapun komunikasi yang diperlihatkan oleh Babinsa (Bintara Pembina Desa) dalam mensosialisasikan pentingnya mengendalikan penduduk untuk cukup memiliki 2 anak dalam setiap keluarga dengan cara mengikuti program KB. Selain memberikan pengertian kepada Pasangan Usia Subur, Babinsa juga melakukan komunikasi kepada remaja melalui PIK-R untuk menunda pernikahan dini dengan menjelaskan minimal usia pernikahan yaitu bagi pria 25 tahun dan 21 tahun bagi wanita.

Konflik hadir untuk menentukan suatu organisasi mampu menghadapinya dan menjadi evaluasi dalam berkegiatan di organisasi atau menghindari dari masalah yang ada sehingga tidak ada kemajuan yang didapat. Berkaitan dengan ini, penulis juga meninjau aspek penyelesaian sengketa atau konflik yang muncul saat diadakanya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), Advokasi dan penyuluhan program KB sebagai bentuk dari upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk. penyelenggaraan pelayanan dalam rangka mengendalikan pertumbuhan penduduk untuk mendapatkan keluarga sejahtera bagi masyarakat masih terdapat penolakan. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, masyarakat melakukan penolakan karena belum terbiasa dengan hal baru dan jarang mengunjungi fasilitas kesehatan. apabila ditemukan peserta KB yang mengalami kegagalan yang biasanya itu sedang dalam mengikuti program KB akan tetapi terjadi kehamilan maka akan dibantu dari selama masa kehamilan dan setelah persalinan bayi. Selain itu juga akan meyakinkan kembali kepada akseptor KB memberikan Advokasi agar akseptor mau kembali mengikuti program KB. Dari sisi lain juga melakukan komunikasi dengan masyarakat untuk memberikan keyakinan dan situasi yang tenang agar tetap percaya dengan program KB sebagai program dari pemerintah untuk merencanakan atau mencegah kehamilan.

Dalam bidang medis kata terapi mempunyai persamaan makna dengan kata pengobatan. Terapi dapat disimpulkan usaha pengobatan yang dilakukan ahli terhadap klien dengan cara medis maupun non medis. Dengan terapi seorang klien dapat berusaha untuk menyembuhkan penyakit ataupun gangguan yang dialaminya seperti dalam hal kecemasan, stress atau yang lain. pelayanan KB tidak hanya berkaitan dengan terjaminya pengendalian penduduk melalui pencegahan kehamilan, namun penanganan terhadap kegagalan ber-KB juga difasilitasi seperti rasa kurang cocok ketika menggunakan metode kontrasepsi tertentu. Jaminan tersebut tidak didapatkan hanya pada masyarakat yang berhasil menunda punya anak, tapi juga memastikan akseptor yang hamil saat menggunakan alat kontrasepsi mendapat pelayanan yang tepat sesuai dengan prosedur dan standar medis juga biaya penanganan kehamilan dan kelahiran ditanggung oleh pemerintah. Pihak yang hanya diperbolehkan untuk melakukan sosialisasi, mempraktekkan penggunaan alkon, baik pelayanan KB maupun penanganan kasus kegagalan KB adalah tenaga medis yang telah mendapatkan pelatihan profesional dan dengan memanfaatkan standar sarana dan prasarana yang layak. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 28 Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009. Tenaga medis yang dimaksud adalah bidan pengelola program KB dan dokter di seluruh fasilitas kesehatan puskesmas, praktek dokter dan bidan di seluruh kecamatan Kabupaten Demak. Terkait sarana dan prasarana penunjang layanan, pengelola program belum terfasilitasi dengan optimal mengingat peralatan yang dibutuhkan hanya tersedia pada Rumah Sakit Umum dan Swasta. Sehubungan dengan hal tersebut, upaya yang dilakukan oleh bidan atau

dokter adalah melakukan deteksi kehamilan secara akurat sehingga saat dirujuk ke rumah sakit, Wanita Usia Subur mendapatkan penanganan yang tepat dan cepat.

3.2. Hambatan dalam Pelaksanaan

Analisis hambatan atau kendala ditemukan penulis dalam penyelenggaraan mengendalikan pertumbuhan penduduk. Kecukupan jumlah pegawai dengan ruang lingkup wilayah kerja menjadi indikator terpenuhinya standar pelayanan yang optimal. Apabila suatu layanan terlaksana dengan durasi waktu yang lama maka kekurangan personil dapat menjadi salah satu penyebabnya. Berhubungan dengan hal tersebut penulis meletakkan titik fokus pada kecukupan personil penuluh berdasarkan jumlah desa dan kelurahan yang terdapat dalam suatu kecamatan. Fungsi komunikasi kurang tercapai karena jumlah pegawai lapangan yang kurang. Akibatnya KIE, Advokasi dan penyuluhan KB tidak dapat merata dalam melakukan sosialisasi. Selain pada jumlah tenaga lapangan yang kurang, faktor penghambat yang dihadapi juga terdapat masalah lain yaitu pada bagian pendanaan atau alokasi anggaran pada kegiatan sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan seperti podcast dan sosialisasi lainnya untuk mengedukasi masyarakat seperti Bina Keluarga Remaja, PIK-Remaja, Sekolah Siaga Kependudukan masih dianggap kurang efektif karena intensitas pelaksanaan yang tidak sering dilakukan. Kesertaan dan pentingnya mengikuti program KB sudah dianggap sebagian besar masyarakat sebagai bagian dari kepentingan pada Wanita Usia Subur. Program KB dianggap masyarakat bisa membantu penundaan kehamilan sebagai wujud dari program pemerintah dengan mebatasi 2 anak pada setiap keluarga, akan tetapi masyarakat masih banyak yang belum ikut serta menggunakan metode operasi wanita dan implan dengan alasan masih menggunakan metode pil KB yang dianggap mudah untuk didapat.

3.3. Upaya dalam pelaksanaan

Respon organisasi dalam menyikapi suatu fenomena atau gejala yang muncul pada program dan kegiatan dapat berupa upaya organisasi. Hal ini merupakan perwujudan penanggulangan masalah yang terjadi supaya setiap tujuan dapat dicapai tanpa gangguan dari hambatan itu sendiri. Hambatan yang ada pada keterbatasan anggaran untuk pendanaan kegiatan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi berupa sosialisasi membuat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana harus memanfaatkan kegiatan dari masyarakat. Upaya untuk mengoptimalkan kegiatan dengan keterbatasan dana dilakukan dengan ikut serta pada kegiatan yang berlangsung dengan tujuan untuk meminimalisir pengeluaran dan program tetap tercapai. Upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan dengan ikut serta kegiatan PKK yang diselenggarakan masyarakat dengan melakukan penyuluhan KB terhadap peserta PKK. Kegiatan lain yang juga dilakukan yaitu sekolah siaga kependudukan dan PIK-Remaja. berbeda hal dengan penyuluhan KB, kegiatan ini dilaksanakan di Sekolah Menengah Atas dengan peserta siswa dengan kategori remaja yang mempunyai usia antara 15 sampai 18 tahun. Kegiatan sekolah siaga kependudukan menggunakan jam pembelajaran yang berlangsung di sekolah. Hambatan yang terjadi pada faktor eksternal yaitu pada masyarakat menjadi tantangan bagi pemerintah. Metode operasi wanita (MOW) dan implan/susuk pada program Keluarga Berencana masih dianggap masyarakat sebagai hal baru bagi masyarakat yang sebelumnya menggunakan metode pil atau suntik. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai instansi yang mempunyai tanggung jawab dengan memberikan uang saku bagi masyarakat yang mau berpartisipasi pada metode operasi wanita atau metode operasi pria.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis menemukan metode menarik yang digunakan dalam melakukan komunikasi dengan masyarakat. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dimana cara berkomunikasi dapat membentuk pola pikir masyarakat mengenai suatu pandangan. Komunikasi ini dilakukan dengan mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan podcast pada radio suara kota wali dimana radio lokal yang ada pada daerah. Selain itu dalam menghadapi masalah komunikasi dilakukan dengan cara jempot bola dengan memberikan advokasi melalui PLKB dibantu dengan tenaga medis.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari dimensi peran yang telah dibahas dalam penelitian, maka penuli mengambil kesimpulan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak sudah berperan secara optimal dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk di kabupaten demak. Dari dimensi peran yang digunakan dalam penelitian, dapat disimpulkan Dimensi peran sebagai suatu kebijakan, terdapat kebijakan Nasional yang digunakan dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk yaitu Bangsa Kencana dan peningkatan mutu pelayanan yang ada di fasilitas kesehatan. Peran sebagai suatu strategi melakukan pendekatan pelayanan melalui fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Terdapat 73 fasilitas kesehatan dari swasta dan pemerintah, 191 praktek bidan mandiri dan 38 praktek dokter yang bekerja sama dalam pelayanan KB, Komunikasi, Informasi dan Edukasi. Pelaksanaan podcast pada radio dilaksanakan oleh stakeholder dalam peran sebagai alat komunikasi, secara langsung maupun tidak langsung juga dilaksanakan melalui PIK-R, Generasi Remaja, Sekolah Siaga Kependudukan, Whatsapp massanger. Masih terjadi penolakan terhadap program KB yang disebabkan karena kurangnya pemahaman penyampaian pesan, dalam ber-KB diberikan biaya kepada peserta yang mengalami kegagalan dari saat kehamilan sampai dengan kelahiran.

Keterbatasan Penelitian: keterbatasan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana saat melaksanakan mengendalikan pertumbuhan penduduk masih terbatas tenaga lapangan/PLKB yang merupakan pegawai yang mempunyai kompetensi terhadap pelaksanaan program KB, advokasi, komunikasi, edukasi dan informasi, Keterbatasan anggaran yang digunakan untuk sosialisasi dan Faktor eksternal yang menjadi masalah adalah kesertaan masyarakat dalam mengikuti program KB masih rendah.

Arah Masa Depan Penelitian (future work): Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan mengendalikan pertumbuhan penduduk untuk menemukan hasil yang lebih mendalam

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada kepala dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Crosswell, J. 2015. *Research desaign : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Miixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gulo, W. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Heroeputri, A., & Santoso, M. A. 2003. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WAHLI).
- Huberman, M., & Saldana. 2014. *Qualitative and Data Analysis* (3rd ed.).
- Mantra, I. B. 2013. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Nazir, M. 2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pamungkas, N. T. n.d.. *Pertumbuhan Penduduk*. Klaten: Cempaka Putih.
- Said, M. N. 2019. *Dinamika Penduduk* (R. S, Ed.). Semarang: Alprin.
- Sarwono, S. W. (2002). *Psigologi Sosial Individu dan Teori-Teori Sosiologi Sosial*. Jakarta: Bina Aksar.
- Simangungsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, & Soerjono, P. D. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, M. (2013). *Kepemimpinan Dalam Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abdurrahma, Rahman, M. T., & Ayu, D. P., 2019, Strategi dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam pelaksanaan pengendalian laju pertumbuhan penduduk kota mataram, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 7, 139-152.
- Larasati, Muda, I., Batubara, B. M., & Suharyanto, A, (2019), Peranan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam Pengendalian Pertumbuhan Penduduk, 13-18. doi:Perspektif
- Syarifuddin, & Mulda, R, 2020, Implementasi Kebijakan Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Jumlah Penduduk Di Kelurahan Galang Baru Kota Batam, *Jurnal Trias Politika*, 4, 28-43.